

INSPIRAT

Inspirasi & Strategi

Jurnal Kebijakan Publik & Bisnis

1. Penduduk, Pembangunan Daerah, dan Perkembangan Usaha Kecil:
Pendekatan Panel Data
Ahmad Rifa'i
2. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Tabungan Britama PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Jember
Imam Suroso
3. Interaksi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Birokrasi di Indonesia Sebuah Tantangan Pembangunan Demokrasi di Aras Lokal
Edy Budi Susilo
4. Questioning Women's Security in Perda Syariah Critics to Indonesia's District Policies
Erwin Nur Rif'ah | Honest Dody Molasy
5. Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor dan Ekuitas Perusahaan terhadap Expected Return Saham
Pusvita Indria Mei Susilowati dan Fatimah
6. Kebijakan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi di Eks Kariseidenan Besuki
Rachmat Hidayat
7. Analisis Komparasi Perkembangan Kemampuan Keuangan Berbasis Rasio APBD Antar Daerah dengan PDRB Tinggi dan Rendah di Era Otonomi
Taufik Kurrohman
8. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kabupaten Sampang
Anwar
9. Created Innovation dan Peningkatan Akses Pasar Usaha Kecil Logam di Tulungagung
Edy Wahyudi
10. Strategi E-Commerce di Era Netizen Customer
Sri Wahyuni

Kebijakan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi di Eks Karisedenan Besuki

The Policy of Regional Budget Allocation for Regional Economic Development : A Study at the Ex-Residence of Besuki

Rachmat Hidayat¹

Staf Pengajar Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Jember

ABSTRACT

Regional autonomy has attach to the notion of autonomus independence for the region to govern its regional revenue. The allocation of regional budget for regional economic development has been played as a vital instrument for detecting the degree of autonomus fiscal independence of a region, thus, the structure of regional revenue has been cordially attached to the surroundings factors, as well as the structure of economic development. The research findings displays the revenue structure of four regency in the Ex-resident of Besuki which is: Jember, Banyuwangi, Situbondo and Bondowoso fro the budget year of 2001 to 2005. The results are not surprising since most of the regency in the Ex -resident of Besuki are not well autonomus in dealing with their fiscal capability. The structure of the regional revenue has showed little portion compared to the Central Government transfer fund. The portion has displays most of the regional revenue only compliment not more then 20 % to the regional budget compared to the central government transfer fund which mounted up to 60%. This finding indicates regional government hasnt fully operated under the notion of an autonomus region with its own fiscal capability.

Keyword: Regional Budget, Regional Dèvelopment

ABSTRAK

Otonomi daerah telah meletakkan kemandirian daerah dalam pembiayaan setidaknya pengeluaran rutin dengan PAD. Kemandirian fiskal dapat dipelajari dengan melihat indikator derajat desentralisasi fiskal yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Penerimaan. Kemandirian fiskal akan sangat bergantung pada pola alokasi anggaran APBD guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi ini akan terkait dengan perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi suatu wilayah yang lebih dikenal dengan perubahan struktur ekonomi. Hasil penelitian menemukan bahwa secara struktur penerimaan (pendapatan) keuangan Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso selama kurun waktu tahun 2001-2005 menunjukkan secara keuangan belum mandiri secara keuangan. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk *Subsidi Daerah Otonom dan Inpres* atau dalam bentuk *block grant*

Kata Kunci: Alokasi, APBD, Ekonomi Daerah

¹ Alamat Korespondensi: Prodi Administrasi Publik FISIP Universitas Jember
email : kognisi@gmail.com

Otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya untuk menciptakan demokratisasi ekonomi, khususnya persamaan, menggali dan memanfaatkan potensi daerah bagi daerah itu sendiri, namun secara ekonomis otonomi daerah dapat dipandang sebagai upaya untuk melakukan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi yang dimaksud dapat terlealisasi bila pemerintahan daerah mampu mengembangkan dan mendayagunakan potensinya secara optimal, artinya pemerintah daerah dengan segala upayanya harus terus menggali dan mengembangkan potensi daerahnya dengan sungguh-sungguh, sehingga untuk mendukung realisasi tersebut diperlukan kebijakan pemerintah dalam memobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah untuk pembangunan daerah. Berdasarkan logika ini maka seharusnya otonomi daerah berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.

Laode Ida (2000) mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari Otonomi Daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya dengan Otonomi daerah maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, Dimensi Budaya, artinya dengan Otonomi daerah, maka masyarakat lokal harus diberi kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis lokal.

Otonomi daerah akan efektif jika diikuti dengan otonomi keuangan daerah. Otonomi keuangan daerah akan dapat dicapai jika daerah mampu membiayai pengeluarannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam era otonomi banyak daerah berlomba meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber PAD. Berbagai retribusi dan pungutan diintensifkan untuk mendongkrak PAD. Semangat mendongkrak PAD bahkan kebablasan seperti menaikkan tarif pelayanan rumah sakit milik daerah yang merupakan sarana pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, meski pendapatan yang diperoleh tidak seluruhnya untuk pengembangan rumah sakit (Kompas 17 Juni 2005).

Hasil penelitian terhadap APBD terdahulu yang dilakukan oleh Penulis empat Kabupaten eks Karisidenan Besuki juga menunjukkan kecilnya kontribusi PAD dalam pembangunan daerah.

Tabel 1 Rerata Rasio Penerimaan 4 Kabupaten, 1997 – 2004 (%)

Uraian	Kabupaten			
	Jember	Banyuwangi	Situbondo	Bondowoso
PAD/Penerimaan	7.55	7.33	5.39	5.13
Retribusi Daerah / PAD	51.01	52.27	36.57	52.55
Dana Perimbangan / Penerimaan	71.59	82.01	79.07	67.26
Bagi Hasil Pajak / Penerimaan	5.86	5.97	6.77	5.53

Sumber : Alokasi APBD untuk pelayanan kebutuhan dasar, Hidayat (DIPA-Lemlit Ur 2005)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah belum menunjukkan perubahan yang signifikan pada struktur penerimaan (pendapatan) daerah dan masih menunjukkan belum adanya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari komposisi penerimaan (pendapatan) masih didominasi dari *Dana Perimbangan* yang bersumber dari *Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bantuan Pemerintah Pusat (DAU – DAK)*, sedangkan sumber PAD dan Penerimaan lain yang sah memberi kontribusi yang rendah (dibawah 8 %).

Indikasi lain dari kurang mandiri pemerintah daerah adalah relative rendahnya PAD dibanding total penerimaan. Pada hakekatnya PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah secara leluasa bagi pelayanan masyarakat. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah relative tingginya kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa relative besarnya pungutan yang dikenakan pemerintah daerah pada masyarakatnya. Seharusnya sumber kontribusi terbesar adalah kontribusi dari Laba BUMD. Pelaksanaan otonomi daerah telah mendorong pemerintah daerah berlomba meningkatkan PAD melalui peningkatan retribusi daerah yang justru meningkatnya beban masyarakat.

Fokus Penelitian

APBD hakekatnya merupakan kontrak politik antara rakyat (yang diwakilkan kepada DPRD) dan eksekutif. Melalui bekal sumber-sumber ekonomi dalam APBD, eksekutif diharapkan dapat menggerakkan mesin-mesin birokrasi untuk berperan secara strategis dalam meningkatkan pertumbuhan daerah. Dengan kata lain Pemerintah daerah diasumsikan sebagai pembuat / perumus dan pelaksana kebijakan yang memberi corak atau bentuk interaksi antara peran pemerintah dan swasta.

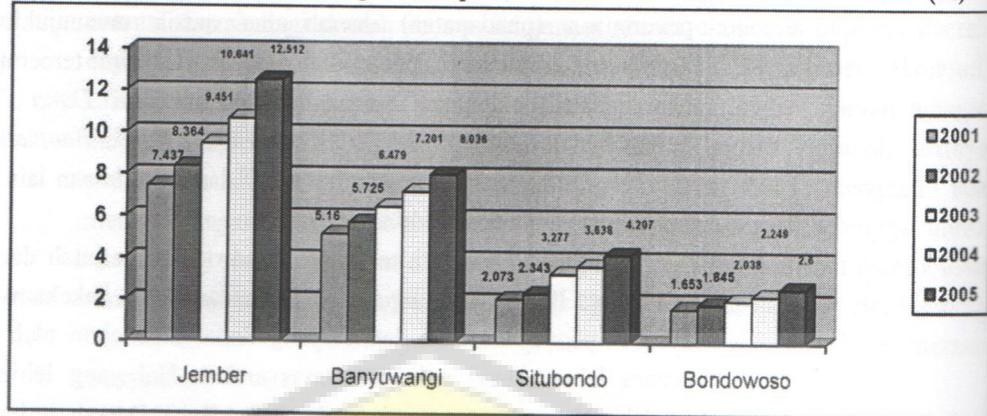
Berdasarkan fakta di atas maka yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah Pertama : bagaimanakah struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di era otonomi? Pertanyaan ini terkait dengan apakah desentralisasi dalam otonomi telah ditunjang oleh kemandirian fiskal masing-masing pemkab? Kedua: apakah dana perimbangan dari pusat telah dialokasikan untuk menunjang pertumbuhan daerah dan peningkatan PAD guna mewujudkan kemandirian fiskal?

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dari uraian di atas dapat digambarkan perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (struktur ekonomi) di empat kabupaten eks karesidenan Besuki. Perubahan struktur ekonomi tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Uraian di atas menggambarkan pertumbuhan Ekonomi di daerah secara sektoral di masing-masing kabupaten.

Pada uraian pembahasan kali ini akan dijelaskan mengenai perbandingan pertumbuhan ekonomi dari ketiga sektor di empat kabupaten eks karesidenan Besuki. Untuk mencermatinya berikut disajikan PDRB secara keseluruhan dari ketiga sektor di empat kabupaten eks karesidenan Besuki dalam kurun waktu tahun 2001-2005.

Gambar 1. PDRB di Empat Kabupaten Eks Karesidenan Besuki 2001-2005 (%)

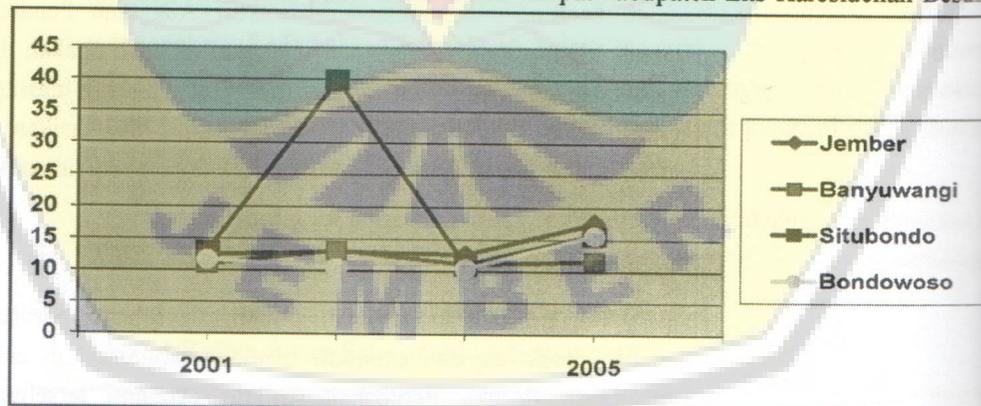


Sumber : PDRB 2001-2005

Berdasarkan tabel tersebut dapatlah dibandingkan beberapa indikator ekonomi pokok di empat kabupaten Eks karesidenan Besuki terlihat besarnya PDRB Kabupaten Jember merupakan paling tinggi tiap tahunnya dibandingkan dengan 3 kabupaten yang lain. Kemudian di ikuti oleh Kabupaten banyuwangi, Situbondo dan yang paling kecil adalah Kabupaten Bondowoso. Besar kecilnya PDRB tersebut sangat dipengaruhi oleh luas wilayah dan potensi masing-masing daerah.

Dari tabel tersebut juga bisa digambarkan bahwa PDRB di empat kabupaten Eks karesidenan Besuki mengalami peningkatan tiap tahunnya selama kurun waktu 2001-2002. Artinya disini bahwa di tiap Kabupaten di empat kabupaten Eks karesidenan Besuki tiap tahunnya mengalami pertumbuhan ekonomi. Adapun grafik persentase pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya dapat digambarkan dalam tabel berikut

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi di empat kabupaten Eks Karesidenan Besuki



Sumber : PDRB 2001-2005

Dari tabel tersebut persentase pertumbuhan ekonomi atau kenaikan PDRB yang paling mencolok terjadi di Kabupaten Situbondo meskipun pernah terjadi penurunan pertumbuhan dari tahun 2003-2004. Untuk Kabupaten lain (Jember, Banyuwangi, Bondowoso) relatif stabil dengan kisaran pertumbuhan tiap tahunnya antara 10 % sampai dengan 20 % .

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dan sumbangan sektor terbesar di tiap Kabupaten di empat kabupaten Eks karesidenan Besuki dalam kurun waktu tahun 2001-2005 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di empat kabupaten Eks Karesidenan Besuki 2001-2005 (%)

Kabupaten	Rata-rata Pertumbuhan (%)	Peranan sektor terbesar
Jember	13,90	Primer (Pertanian)
Banyuwangi	11,71	Primer (Pertanian)
Bondowoso	12,01	Primer (Pertanian)
Situbondo	19,89	Tersier (Perdagangan hotel dan restoran)

Sumber : PDRB 2001-2005

Berdasarkan tabel diatas meskipun Kabupaten Situbondo mempunyai PDRB yang relatif rendah dibandingkan kabupaten Jember dan banyuwangi tetapi selama kurun waktu tahun 2001-2005 rata-rata pertumbuhannya yang paling tinggi yaitu 19,89 % . Besarnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo ini perannya paling besar dipengaruhi oleh sektor Tersier seperti perdagangan hotel dan restoran.

Kondisi ini sangat berbeda dengan Kabupaten lain (Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso) pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut peranan sektor paling besar adalah sektor primer (sektor pertanian).Hal ini terjadi karena kondisi wilayah dimana Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso sangat mendukung potensi pertaniannya dan ini berbeda dengan potensi wilayah di Kabupaten Situbondo

Analisa Alokasi Kebijakan anggaran untuk Mewujudkan Kemandirian fiskal Daerah

Dalam analisis ini dilakukan dengan menghitung besarnya pengaruh anantara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah alokasi kebijakan anggaran yang dengan pertumbuhan Ekonomi yang dinyatakan dengan besaran sumbangan (*share*) masing-masing sektor terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) dan bantuan dari pemerintah pusat diukur dengan menggunakan besaran sumbangan (*share*) bantuan umum (*Block grant*) terhadap total bantuan pemerintah pusat. Sedangkan variabel terikatnya adalah Kemandirian fiskal daerah yang dinyatakan dalam derajat desentralisasi fiskal.. Berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS versi 14 diperoleh hasil yang nampak dalam tabel berikut :

Tabell 3. Hasil Uji Regresi Linear berganda dengan SPSS 14

Kab.	R ²	ANOVA		Coefficients		Durbin Watson	VIF
		F hitung	Asymp Sig	terhitung	Asymp Sig		
Jember	0,235	1,614	0,383	1,541 (G)	0,263 (G)	3,355	1,028
				0,657 (PE)	0,579 (PE)		
Banyuwangi	0,351	2,084	0,324	0,724(G)	0,538(G)	3,502	1,552
				1,089(PE)	0,390(PE)		
Situbondo	0,907	20,394	0,047	2,847(G)	0,104(G)	3,321	1,801
				6,158(PE)	0,025(PE)		
Bondowoso	0,192	0,677	0,596	1,049 (G)	0,404(G)	1,554	1,074
				0,761(PE)	0,526(PE)		

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil diatas uji kolinearitas menunjukkan tidak terjadi heterokedastitas baik untuk variabel bantuan dari pusat dan perkembangan ekonomi karena VIF hampir semuanya lebih kecil dari 2. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bantuan dari pusat dan perkembangan ekonomi terhadap kemandirian fiskal daerah secara bersama-sama digunakan analisis koefisien determinasi berganda. Dari tabel diatas nilai koefisien determinasi (R²) dari regresi maka diperoleh analisa hasil masing-masing kabupaten sebagai berikut :

Table 4. Analisa Hasil Uji Pengaruh Variabel bebas terhadap variabel Terikat

Kabupaten	Analisa Hasil
Jember	R ² sebesar 0,235 artinya 23,5 % kemandirian fiskal hanya bisa dijelaskan oleh faktor bantuan pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi sisanya sebesar 76,5 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini
Banyuwangi	R ² sebesar 0,351 artinya 35,1 % kemandirian fiskal hanya bisa dijelaskan oleh faktor bantuan pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi sisanya sebesar 64,9 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini
Situbondo	R ² sebesar 0,907 artinya 90,7 % kemandirian fiskal bisa dijelaskan oleh faktor bantuan pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi sisanya sebesar 9,3 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini
Bondowoso	R ² sebesar 0,192 artinya 19,2 % kemandirian fiskal bisa dijelaskan oleh faktor bantuan pemerintah pusat dan perkembangan ekonomi sisanya sebesar 80,8 % dijelaskan oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini

Kesimpulan dari analisa diatas dari ke Empat kabupaten di Eks karesidenan Besuki di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso peningkatan besarnya bantuan pemerintah dan perkembangan ekonomi bukan faktor penunjang dan pengaruhnya kecil terhadap Kemandirian fiskal Daerahnya selama kurun waktu 2001-2005. Ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Situbondo peningkatan

bantuan pemerintah dan perkembangan ekonomi justru menjadi faktor penunjang terhadap kemandirian fiskal daerah dan pengaruhnya besar sekali.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (*block grant*) secara bersama-sama terhadap kemandirian fiskal daerah. Secara bersama variabel perkembangan ekonomi dan besaran bantuan pemerintah (*block grant*) merupakan wujud bentuk Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H_0 : Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal

H_a : Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat maka pengujian hipotesisnya dengan menggunakan uji F. Dimana H_0 ditolak artinya Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (*block grant*) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah atau Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tidak mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal apabila diketahui $F_{hitung} > F_{tabel}$.

Dengan berdasarkan hasil perhitungan (tabel) diatas maka hasil uji hipotesis dimasing-masing daerah bisa digambarkan sebagai berikut

Tabel 5. Analisa Hasil Uji Hipotesis Variabel bebas terhadap variabel Terikat

Kabupaten	Analisa Hasil
Jember	Diketahui F_{hitung} 1,614 sedangkan $F_{tabelnya}$ dengan $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$, yaitu 19,0. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ (1,614 < 19,0) ini berarti variabel bebas (Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (<i>block grant</i>)) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti H_0 diterima H_a ditolak
Banyuwangi	Diketahui F_{hitung} 2,084 sedangkan $F_{tabelnya}$ dengan $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$, yaitu 19,0. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ (2,084 < 19,0) ini berarti variabel bebas (Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (<i>block grant</i>)) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti H_0 diterima H_a ditolak
Situbondo	Diketahui F_{hitung} 20,394 sedangkan $F_{tabelnya}$ dengan $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$, yaitu 19,0. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (20,394 > 19,0) ini berarti variabel bebas (Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (<i>block grant</i>)) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti H_0 ditolak H_a diterima
Bondowoso	Diketahui F_{hitung} 0,677 sedangkan $F_{tabelnya}$ dengan $\alpha = 0,05$ $df_1 = 2$ dan $df_2 = 2$, yaitu 19,0. Jadi $F_{hitung} < F_{tabel}$ (0,677 < 19,0) ini berarti variabel bebas (Perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (<i>block grant</i>)) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hal ini berarti H_0 diterima H_a ditolak

Kesimpulan dari analisa diatas dari ke Empat kabupaten di Eks karesidenan Besuki di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso bahwa perkembangan ekonomi daerah dan besaran bantuan pemerintah (*block grant*) secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah selama kurun waktu 2001-2005. Artinya bahwa di kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tidak mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal.

Hal Ini juga bisa dilihat bahwa secara parsial besaran bantuan pemerintah di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso tidak punya pengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah dengan masing-masing t hitung $< t$ tabel (2,92) lihat ditabel. Artinya disini bahwa kebijakan alokasi anggaran untuk meningkatkan peran bantuan pemerintah tidak ada pengaruhnya dalam mendongkrak kemandirian fiskal daerah. Begitu pula tingkat perkembangan ekonomi juga tidak punya pengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso hal itu bisa dilihat dari uji secara parsial diketahui t hitung $< t$ tabel (2,92) lihat tabel.

Ini berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Situbondo peningkatan besarnya bantuan pemerintah dan perkembangan ekonomi justru secara-secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah selama kurun waktu 2001-2005. Artinya bahwa di kabupaten Situbondo Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal. Jika dilihat secara parsial yang mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah adalah tingkat perkembangan ekonomi itu bisa dilihat dari uji secara parsial diketahui t hitung (6,158) $> t$ tabel (2,92) dengan asymp Sig (0,047) $< \alpha$ (0,05). Sedangkan besarnya bantuan pemerintah tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah ini bisa dilihat dari uji secara parsial diketahui t hitung (2,847) $< t$ tabel (2,92) dengan asymp Sig (0,0104) $> \alpha$ (0,05). Jika dilihat dari struktur ekonomi dari 4 kabupaten di eks karesidenan besuki kabupaten Situbondo yang memang selama kurun waktu 2001-2005 rata-rata tingkat pertumbuhannya paling tinggi yaitu 19,89 %.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana terurai pada bagian sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Struktur penerimaan (pendapatan) keuangan Kabupaten Jember, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso selama kurun waktu tahun 2001-2005 masih menunjukkan PAD belum memberi kontribusi yang signifikan (sangat kecil dibawah 20 %) dibanding Dana Perimbangan terutama yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Dengan kata lain ke-4 kabupaten dalam penelitian menunjukkan secara keuangan belum mandiri secara keuangan.
2. Secara struktur Ekonomi menunjukkan Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso rata-rata pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2001-2005 dengan) adalah 11,71 % sampai 13,90 % dan di dominasi oleh sektor Primer (Pertanian).

Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Situbondo sebesar 19,89 dan di dominasi oleh sektor tersier (Perdagangan hotel dan restoran. Pertumbuhan ekonomi tertinggi disektor pertanian yang terjadi di Kabupaten Jember, Banyuwangi, dan Bondowoso karena kondisi wilayah sangat mendukung potensi pertaniannya dan ini berbeda dengan potensi wilayah di Kabupaten Situbondo

3. Secara struktur anggaran di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso selama selama kurun waktu 2001-2005 peningkatan besarnya bantuan pemerintah dan perkembangan ekonomi ternyata bukan faktor utama penunjang terhadap kemandirian fiskal Daerahnya. Hal ini bisa diketahui dari kecilnya nilai Koefisien determinasi (R^2) antara 19,2 % (0,192) – 35,1 % (0,351). Ini berbeda dengan di Kabupaten Situbondo peningkatan bantuan pemerintah dan perkembangan ekonomi justru menjadi faktor penunjang utama terhadap kemandirian fiskal daerah dan pengaruhnya besar sekali. Hal ini bisa diketahui nilai Koefisien determinasi (R^2) besarnya 0,907 artinya 90,7 %.
4. Kebijakan alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso tidak mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal daerahnya .Hal ini bisa diketahui dari uji hipotesis didapatkan nilai Fhitung < F tabel dengan nilai Fhitung berkisar antara 0,677 - 2,084 dan ini jauh dari nilai F tabel (19,00). Dengan uji hipotesis secara parsial ternyata besaran bantuan pemerintah dan tingkat perkembangan ekonomi di kabupaten Jember, Banyuwangi dan Bondowoso tidak punya pengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah dengan masing-masing t hitung < t tabel (2,92).
5. Di Kabupaten Situbondo Kebijakan Alokasi anggaran untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ternyata mampu mewujudkan kemandirian otonomi fiskal daerahnya Hal ini bisa diketahui dari uji hipotesis didapatkan nilai Fhitung > F tabel dengan nilai Fhitung 20,394 lebih besar dari F tabel (19,00). Dan dari kebijakan alokasi anggara tersebut pengaruh yang paling signifikan terhadap kemandirian fiskal di kabupaten situbondo adalah tingkat perkembangan ekonomi. Hal itu bisal dilihat dari uji hipotesis secara parsial diketahui t hitung (6,158) > t tabel (2,92) dengan asymp Sig (0,047) < α (0,05). Sedangkan besaran bantuan pemerintah tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah ini bisa dilihat dari uji secara parsial diketahui t hitung (2,847) < t tabel (2,92) dengan asymp Sig (0,0104) > α (0,05). Jika dilihat dari struktur ekonomi dari 4 kabupaten di eks karesidenan besuki kabupaten Situbondo yang memang selama kurun waktu 2001-2005 rata-rata tingkat pertumbuhan ekonominya paling tinggi yaitu 19,89 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Nursalim, 1990, Hubungan Fiskal Antar Pemerintah di Indonesia, Jakarta : Analisa, Tahun XIX, No 3, Juni 1990
- Bratakusumah, Deddy Supriadi dan Dadang Solihin, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayat, Rachmat, Dwi Sungkowo, 2005, *Penelitian Alokasi APBD untuk pelayanan Kebutuhan dasar di era desentralisasi pada empat kabupaten eks Karesidenan Besuki*, Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Korten, David C, 1985, *Social Development : Putting People First, Bureacracy and the Poor : Closing the Gap*, the Asian Institute of Management, Manila, 2nd Printing.
- _____, dan Sjahrir (ed), 1998, Pengembangan Berdimensi Kerakyatan, Jakarta : Yayasan Obor.
- Radianto, Elia, 1997, Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku, Jakarta : Prisma, No 3 Tahun XXVI, Maret 1997.
- Sugiyono, 2000, Statistika Untuk Penelitian, Bandung : Alfabeta.
- Suryawikarta, B, 1995, Implikasi Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Dati II dan Restrukturisasi Birokrasi untuk Meningkatkan Kinerja Pembangunan dan Mutu Pelayanan, Makalah Seminar FISIP Unsoed dan Pemda Kabupaten Banyumas.
- Wahab, Solihin Abdul, Fadillah Putra dan Saiful Arif, 2002, Masa Depan Otonomi Daerah : Kajian Sosial, Ekonomi dan Politik Untuk Menciptakan Sinergi dalam Pembangunan Daerah, Surabaya : Penerbit SIC.
- Weningsih, Sri, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Banyumas : Sistem Kelembagaan dan Efektivitas Pelaksanaannya, Jakarta : Jurnal Studi Indonesia Vol 10 No 1 Maret 2000, PSI – UT.

Terbitan dan Koran :

- Anonim, 2003, Data dan Informasi, Komite Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- _____, 2003, Pedoman Umum Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Komite Penganggulangan Kemiskinan, Jakarta.
- _____, 2005, Indikator ekonomi memburuk, Kompas, 2/9/2005
- _____, 2005, Tinjau Desentralisasi Pelayanan Dasar, Kompas, 17/6/2005
- _____, 2005, Pengadaan Mobil Dinas Tidak Berdasar Hukum Kuat, Kompas, 14/7/2005.
- _____, DPR Tuding Eksekutif Juga Boros, Kompas, 14/7/2005.
- Astuti, Esther Sri, Joko Tri Haryanto, Analisis Dana Alokasi Umum dalam era Otda Studi kasus 30 Propinsi, Manajemen Usahawan, No 12 Desember 2005
- Adingingsih, Sri, 2005, Instabilitas Ekonomi yang Membahayakan, Bisnis Indonesia, 7/7/2005.
- Asyarie, Musa, 2005, Korupsi dan Transaksi Kekuasaan, Kompas, 6/5/2005